**PENDIDIKAN KARAKTER KEAGAMAAN-KEBANGSAAN BERBASIS KETELADANAN**

**Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana**

IAIN Tulungagung

Email: a\_bahasy@yahoo.com

**ABSTRACT**

Example Kyai Hashim Ash'ari very relevant educational materials used as the religious-national character. The example could be included as Subjects divided Islamic education and Manners Classes Five SD/MI, in accordance with the annex to the Regulation-24 the Minister of education and culture of the Republic of Indonesia Number 24, 2016, core competencies for social attitudes requires the existence of a relationship between religious character (honesty in building social interaction) and love the motherland. The regulation has limitations in providing learning materials. The only use of the regulatory acts of the Prophet as an exemplary figure for religious and nationality characters exemplify. The disadvantage is that only materials provide a character one religion with learners. The use of figures can mask the weakness of Kyai Hashim. As scholars and national hero, Kyai Hashim is a character that one religion and one country with learners in the context of Indonesia.

**Keywords**: Kiai Hasyim Ash'ari, character, Religious-nationality, and Islamic studies.

# PENDAHULUAN

Salah satu amanat kurikulum Pendidikan 2013 adalah pelaksanaan pendidikan karakter. Semangat yang dibawa kurikulum tersebut tidak lepas dari semangat pembangunan peserta didik Indonesia, yang tidak hanya diharapkan mahir di bidang kemampuan intelektual, tetapi juga diproyeksikan mempunyai kemahiran dalam mengembangkan kemampuan emotional-spiritual. Selama ini, salah satu kelemahan kurikulum pendidikan hanyalah menghantarkan peserta didik mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Kelemahan ini menyebabkan orientasi peserta didik hanyalah untuk mendapatkan nilai. Sebagai akibatnya, mereka terlupa bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Kurikulum Pendidikan 2013 dihadirkan untuk mengingatkan kembali bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan kemampuan kognitifnya, tetapi juga kemampuan afektif dan psikomotoriknya.

Sayangnya, pelaksanaan pendidikan karakter sebagai amanat kurikulum 2013 tersebut juga mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah masih sedikitnya materi bahan ajar yang berbasis kepada pengetahuan lokal. Kasus tersebut bisa ditemukan kepada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima MI/SD. Salah satu Kompetensi Inti yang ingin dicapai adalah Kompetensi Sikap Sosial. Menurut lampiran ke-24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pemerintah menetapkan bahwa kompetensi sikap sosial adalah siswa diharapkan menunjukkan sikap/perilaku yang jujur, disiplin, percaya diri, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam membangun interaksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air Indonesia.

Akan tetapi, tokoh yang dijadikan contoh penteladanan melalui bahan ajar mata pelajaran tersebut masihlah berangkat dari tokoh non nasional. Tokoh yang digunakan adalah para Nabi yang berasal dari Timur Tengah. Memang pengenalan Nabi bagi umat Islam adalah hal yang sangat penting. Tetapi, akan terasa lebih lengkap juga untuk memadukan perjuangan para Nabi tersebut dengan tokoh nasional dalam penyampaian materi yang bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai sikap sosial mencintai tanah air. Memang penggunaan tokoh Nabi bisa memperkuat rasa seagama antara peserta didik dengan tokoh sebagai bahan ajar tersebut. Tetapi, penggunaan keteladanan tokoh non nasional tersebut sebagai bahan ajar tentunya akan mempunyai kelemahan tersendiri. Salah satu kelemahannya adalah tidak adanya rasa sesama sebangsa dan senegara antara peserta didik dengan tokoh tersebut.

Oleh sebab itu, penelitian ini dihadirkan untuk menggali keteladanan dari tokoh nasional sebagai bahan ajar materi pendidikan karakter keagamaan-kebangsaan. Salah satu tokoh yang akan dimunculkan adalah Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari (Kyai Hasyim Asy’ari). Selain dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama’ (salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia), Kyai Hasyim Asy’ari juga telah dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Penganugerahan tersebut menunjukkan bahwa Kyai Hasyim bisa menjadi salah satu tokoh nasional yang sangat relevan sebagai bahan ajar untuk materi pelajaran yang bertujuan menyampaikan kompetensi sosial perpaduan antara semangat keagamaan dan cinta tanah air (pendidikan karakter keagamaan dan kebangsaan). Salah satu mata pelajaran dengan target kompetensi sosial tersebut adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas Lima SD/MI.

Selama ini telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai kandungan karakter keagamaan-kebangsaan pada diri Kyai Hasyim. Pemaparan mengenai tema tersebut juga bervariasi. Ada penelitian yang menggunakan karakter keagamaan-kebangsaan Kyai Hasyim Asy’ri hanya sekedar untuk pengembangan kajian hubungan antara agama dan politik. Hal ini bisa ditemukan pada Zaini Tamin Abd Rohim “Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)”[[1]](#footnote-1). Ada pula penelitian yang mengkaji Kyai Hasyim Asy’ari hanya pada pengembanggan kajian pendidikan karakter keagamaan saja.[[2]](#footnote-2)Ada pula yang mengkombinasikan karakter keagamaan-kebangsaan Kyai Hasyim Asy’ari dengan Kyai Ahmad Dahlan. Pemikiran kedua tokoh tersebut digunakan untuk mengkaji terjadinya pembaharuan Pendidikan Indonesia.[[3]](#footnote-3) Ada juga yang mengkaji kontribusi pemikiran Kyai Hasyim Asy’ari bagi pembaharuan pendidikan Islam Indonesia.[[4]](#footnote-4)

 Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di atas adalah terdapat pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya belum memfokuskan kepada pemanfaatan pemikiran kyai Hasyim Asy’ari sebagai pengembangan bahan ajar, apalagi untuk bahan ajar Mata Pelajaran tertentu seperti Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Penelitian sebelumnya juga belum memfokuskan pada kelas yang dituju. Sementara, penelitian ini memfokuskan penggunaan pemikiran sekaligus tindakan Kyai Hasyim Asya’ri (yang diringkas dengan keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari) sebagai tawaran bahan ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima SD/MI. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan bahan ajar yang berbasis tokoh nasional lokal untuk membangun karakter keagamaan-kebangsaan sebagai pemenuhan kompetensi inti sikap sosial sesuai amanat kurikulum 2013.

# METODE PENELITIAN

Kategori penelitian ini adalah kepustakaan yang menekankan aktivitas penelitian berupa pembacaan dan analisis atas keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari dan kebijakan mengenai pendidikan karakter di Indonesia. Terkhusus untuk menggali keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari, penelitian ini akan mengkaji karya Kyai Hasyim atau karya orang lain yang membahas pemikiran Kyai Hasyim, sehingga bisa dikatakan pula bahwa penelitian ini menggunakan metode filologi. Menurut Djamaris filologi merupakan suatu ilmu penelitian yang berobjek kepada manuskrip atau naskah.[[5]](#footnote-5) Meminjam istilahnya Baroroh-Barried (1985: 5-6), pengkajian keteladanan Kyai Hasyim mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) memahami sejauh mungkin karakter keagamaan-kebangsaan yang terkandung dalam pemikiran Kyai Hasyim melalui karyanya; 2) memahami makna dan fungsi karya Kyai Hasyim bagi masyarakat masa lalu dan sekaligus masa sekarang (terutama untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air); 3) mengungkapkan nilai-nilai karakter keagamaan-kebangsaan Kyai Hasyim.[[6]](#footnote-6)

Subjek dalam penelitian ini adalah keteladanan Kyai Hasyim (pemikiran dan perjuangan), baik yang tertulis dalam beberapa kitabnya maupun fatwa dan ucapannya yang bisa dibuktikan dengan dokumen sejarah yanng otentik. Dalam mengkaji pemikiran kyai Hasyim Asy’ari, peneliti menempuh beberapa langkah, yakni: inventarisasi naskah, deskripsi naskah, pembacaan teks, transliterasi teks, suntingan teks, terjemahan teks, dan pemaknaan teks. Pada umumnya, inventarisasi naskah dilaksanakan dengan cara studi katalog melalui pengamatan langsung di perpustakaan bagian pernaskahan, instansi-instansi yang menyimpan naskah maupun koleksi perseorangan[[7]](#footnote-7). Namun, inventarisasi naskah dalam penelitian ini juga dilakukan dengan langkah pengumpulan naskah melalui media online. Inventarisasi naskah akan menemukan beberapa karya yang dipilih sebagai subyek penelitian. Salah satu naskah yang telah berhasil diinventarisasi sebagai rujukan untuk menggali keteladanan Kyai Hasyim adalah Naskah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

Setelah melakukan inventarisasi naskah, langkah selanjutnya adalah melakukan deskripsi naskah. Pada umumnya, deskripsi naskah dilaksanakan dengan cara menggambarkan keadaan naskah yang diteliti dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Naskah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 merupakan naskah yang bisa dideskripsikan. Hal ini bisa dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa teks Resolusi Jihad tersebut pernah diterbitkan melalui Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, edisi No. 26 tahun ke-I, Jumat Legi, 26 Oktober 1945. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan naskah tersebut memang sudah teruji secara kesejarahannya.

Setelah melakukan deskripsi naskah, langkah selanjutnya adalah pembacaan teks. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap isi teks. Pembacaan teks dilakukan dari kata demi kata. Pembacaan teks atas Naskah resolusi Jihad tidaklah mengalami kendala. Setelah pembacaan teks selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan transliterasi. Transliterasi yang dilakukan di sini adalah kegiatan penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf, dari abjad yang satu ke abjad yang lain.[[8]](#footnote-8) Adapun jenis transliterasi yang diterapkan dalam pembacaan Naskah Resolusi Jihad di sini adalah transliterasi standar, yaitu menyalin teks dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, sedangkan ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.[[9]](#footnote-9) Pelaksanaan transliterasi di sini difokuskan untuk mengganti susunan kata ke dalam Ejaan Yang Disempurnakan. Redaksi Teks Resolusi Jihad masih menggunakan Ejaan Lama. Sembari melakukan transliterasi, penelitian ini juga sekaligus melakukan suntingan atas redaksi teks. Suntingan teks yang diterapkan pada Karya Kyai Hasyim adalah kegiatan pembetulan-pembetulan dan perubahan-perubahan pada hasil transliterasi sehingga bersih dari segala kekeliruan.[[10]](#footnote-10)

Setelah suntingan teks, langkah selanjutnya adalah penerjemahan teks. Catford mendefenisikan penerjemahan sebagai kegiatan penggantian bahan teks dari bahasa sumber (BS) dengan bahan teks yang sepadan dengan bahasa target (BT).[[11]](#footnote-11) Terjemahan dilakukan dengan maksud agar masyarakat yang tidak paham bahasa teks dapat memahami isi teksnya. Dalam pembacaan Teks Resolusi Jihad tersebut, penerjemahan Teks dilakukan untuk mengubah istilah dalam Bahasa Arab ke dalam istilah dalam Bahasa Indonesia.

Setelah teks diterjemahkan, langkah yang terakhir adalah melakukan pemaknaan teks hasil terjemahan Resolusi Jihad. Pemaknaan merupakan usaha untuk mengungkap isi teks. Tujuan pemaknaan teks adalah untuk memahami, mengambil nilai positif dan menjelaskan dari isi yang terkandung dalam teks, yakni karakter keagamaan dan kebangsaan Kyai Hasyim yang telah membentuk karakter kepahlawanannya. Untuk membantu memudahkan penggalian pemikirannya tersebut, penulis juga menggunakan beberapa karya pembanding yang semuanya telah tersedia pada sub bab kajian terdahulu. Selanjutnya, pemaknaan teks juga dilakukan untuk melihat relevansi karakter keagamaan-kebangsaan Kyai Hasyim sebagai bahan ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas Lima.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013

Istilah pendidikan karakter tersusun dari dua suku kata, yaitu: ‘pendidikan’ dan ‘karakter’. Kata pendidikan bisa didefinisikan sebagai upaya untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan suasana belajar yang dilaksanakan secara sadar dan terencana. Pihak yang dijadikan objek dalam upaya tersebut adalah peserta didik. Pembelajaran tersebut diberikan kepada peserta didik agar mereka bisa mengembangkan potensi dirinya (yang terdiri dari kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan). Semua potensi tersebut harus dikembangkan oleh setiap peserta didik secara aktif agar mereka bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk kepentingan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan negaranya. Sementara itu, karakter merupakan nilai dasar yang berperan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan kepribadian seseorang. Sebagai nilai dasar, karakter tidak langsung terbentuk dengan sendirinya, tetapi proses pembentukannya melalui pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan. Adanya proses pembentukan itulah yang menyebabkan adanya perbedaan karakter antara satu orang dengan orang lainnya serta perwujudan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. [[12]](#footnote-12)

Penjabaran atas pengertian di atas mendorong pemahaman bahwa pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai karakter kepada peserta didik. Sistem penanaman tersebut dilaksanakan dengan cara penyampaian pengetahuan, penguatan kesadaran dan kemauan, dan penugasan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pelaksanaan sistem penanaman nilai karakter tersebut harus didukung dengan kesadaran setiap peserta bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan diri sendiri, kepentingan sesama manusia, kepentingan lingkungan maupun bangsa dan negara sehingga peserta didik tersebut pada akhirnya menjadi manusia insan kamil.[[13]](#footnote-13)

Upaya untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang berupaya menanamkan nilai karakter kepada mahasiswa bukanlah hanya sekedar wacana di dalam dunia akademik semata. Upaya tersebut juga telah dilaksanakan dengan lahirnya kebijakan pemerintah yang menggariskan sistem pelaksanaan pendidikan yang menggulirkan proses pendidikan dengan target mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Hal itu sangat jelas tersusun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Di Bidang Pendidikan.

Pada Tahun 2009 Depatemen Pendidikan Nasional telah mengidentifikasi 49 kualitas karakter yang dikembangkan dari *Character First* dan disepakati sebagai yang akan dikembangkan dalam pembelajaran di Indonesia. Di antara 49 karakter tersebut, terdapat beberapa karakter yang relevan dikembangkan untuk membangun karakter keagamaan-kebangsaan sebagai menjadi fokus penelitian ini. Beberapa karakter relevan adalah *Security, Self-Control, Justice, Sensitivity, Faith, Obedience, Gentleness, Responsibility*.[[14]](#footnote-14) Beberapa karakter dasar tersebut sangat relevan untuk membangun karakter kebangsaan-keagamaan yang pada dasarnya menjunjung tinggi patriotisme, prinsip-prinsip etika dan moralitas, budi luhur, keteguhan sikap, kejujuran, keberanian, ulet dan tangguh. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air adalah bagian dari delapan belas (18) nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter nasional.[[15]](#footnote-15)

Kebijakan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pendidikan karakter baru benar-benar mendapatkan legalitas hukumnya pada tahun 2013. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Permendikbud 81A/2013). Pasal 2 (1) Permendikbud 81A/2013 menyatakan bahwa pelaksanaan dari amanat implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK harus mengacu dan menggunakan pedoman implementasi kurikulum. Susunan pedoman tersebut terdiri dari lima bagian, yakni: penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, umum pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

Permendikbud 81A/2013 tersebut tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan kurikulum pendidikan karakter. Keberadaannya ditopang dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Permendikbud 67/2013). Keberadaan Permendikbud 67/2013 tersebut sangat penting dalam konteks membicarakan pendidikan karakter keagamaan-kebangsaan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) Kelas Lima SD/MI. Status Permendikbud 67/2013 tersebut menjadi legalitas payung hukum sekaligus menjadi pembeda dari pembelajaran karakter keagamaan-kebangsaan mata pelajaran PAI-BP pada SMP/MTS dan SMA/SMK/MAK/MA. Berdasarkan Kompetensi Inti Bagian 2 Permendikbud 67/2013, peneliti bisa menganalisis bahwa salah satu indikator penerapan karakter keagamaan-kebangsaan bagi peserta didik adalah mereka harus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. Selanjutnya, Bagian 2.9 Salinan Permendikbud 67/2013 mengatur salah satu bahan ajar yang digunakan untuk mencapai komptensi tersebut. Bagian 2.9 menyatakan bahwa setiap siswa diharapkan memiliki sikap *tabligh* sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladan Nabi Muhammad SAW. Istilah “*tabligh*” di sini bisa dimaknai sebagai karakter yang menyampaikan apa yang diperoleh dari pengutusnya.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Nabi SAW mendapatkan pesan dari Allah mengenai kewajiban manusia untuk taat kepada Allah SWT, berbuat baik kepada sesama manusia, dan memelihara bumi seisinya. Tiga dimensi pesan tersebut apabila diteladankan dalam konteks Indonesia menghasilkan kewajiban setiap Muslim Indonesia untuk menjaga keislamannya (karakter keagamaan) dan membangun peradabana manusia Indonesia (karakter kebangsaan).

Dalam perjalanan pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut, pemerintah juga melahirkan kebijakan baru untuk memperkuat posisi pedidikan karakter. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Permendikbud 103/2014). Permendikbud 103/2014 tersebut menggarisbawahi posisi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Menurut Permendikbud 103/2014, pembelajaran merupakan suatu proses pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran tersebut harus menjamin peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan karakter tersbeut berguna bagi keperluan dirinya dalam bermasyarakat dan berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.

Dua tahun pelaksanaan Kurikulum 2013, pemerintah melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Revisi tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Permendikbud 24/2016). Yang membedakan dengan Permendikbud 103/2014, Permendikbud 24/2016 tersebut telah membedakan secara jelas beberapa macam kompetensi inti. Pasal 2 (1) Permendikbud 24/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah tingkatan kemampuan yang merupakan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai dan dimiliki seorang peserta didik untuk melewati setiap tingkat kelas. Selanjutnya, Pasal (2) Permendikbud 24/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

Pembedaan beberapa macam kompetensi inti tertulis dalam Pasal 2 Ayat (3) Permendikbud 24/2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa kompetensi inti terdiri atas sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) Permendikbud 24/2016 menyatakan bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar sangat menentukan bagi keberadaan buku teks. Kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan bahan dasar untuk penetapan dan perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Selanjutnya, mengenai keberadaan lebih rinci bagi materi yang perlu disusun dalam kompetensi dasar, Permendikbud 24/2016 mengaturnya dalam lampiran 24. Lampiran 24 Permendikbud 24/2016 mengatur mengenai penjelasan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD/MI. Yang menjadi Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial) adalah siswa harus mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. Kompetensi Inti Sikap Sosial tersebut menunjukkan adanya penggabungan karakter keagamaan-kebangsaan. Selanjutnya, Kompetensi Dasar dari Kompetensi Inti Sikap Sosial adalah siswa harus mampu menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladan Nabi Dawud A.S, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladan Nabi Sulaiman A.S, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladan Nabi Ilyas A.S, menunjukkan sikap kerja sama sebagai implementasi pemahaman kisah keteladan Nabi Ilyasa’ A.S, dan menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi pemahaman kisah keteladan Nabi Muhammad S.A.W.

Beberapa kompetensi dasar bagi komptensi inti sikap sosial di atas menunjukkan bahwasannya materi pembelajaran bagi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima SD/MI haruslah berkaitan dengan materi kisah Nabi Dawud A.S, Nabi Sulaiman A.S, Nabi Ilyas A.S, Nabi Ilyasa’ A.S, Nabi Muhammad S.A.W. Semua kisah tersebut bisa dikemas dalam rangka memperkuat karakter keagamaan-kebangsaan setiap peserta didik. Mereka semua adalah para tokoh panutan yang telah menyebarkan ajaran tauhid kepada setiap umatnya (pendidikan karakter keagamaan). Selain itu, mereka semua adalah para tokoh pemimpin yang membimbing setiap umatnya meskipun berbeda keyakinan dengan dirinya (pendidikan kebangsaan).

## 2. Kyai Hasyim dan Keteladanannya

Kyai Hasyim Asy’ari merupakan tokoh nasional yang menteladankan karakter keagamaan-kebangsaan melalui perjalanan hidupnya. Keteladanan Kyai Hasyim tersebut tidak hanya membawa pengaruh positif bagi Kyai Hasyim pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi positif para pengikutnya sehingga setia mendukung Kyai Hasyim sampai akhir hayatnya, serta meneladani Kyai Hasyim setelah kematiannya. Bahkan karakter Kyai Hasyim tersebut tidak hanya berhenti mempengaruhi orang-orang di sekitar sang Kyai pada masa hidupnya, tetapi kemudian menjadi daya pengaruh bagi masyarakat di luar lingkungannya maupun rakyat Indonesia sepeninggal sang Kyai untuk selalu mengkaji pemikiran dan meneladani perjuangannya untuk membangun peradaban masyarakat Indonesia.

Karakter keagamaan-kebangsaan Kyai Hasyim dibuktikan dengan pemikiran serta perjuangannya atas masalah keagamaan, keummatan dan kebangsaan, yang ketiganya digunakan sebagai spirit untuk melawan penjajah. Dalam perjuangan keagamaan, Kyai Hasyim telah mendirikan wadah perjuangan umat muslim dengan cara mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng, yang berlokasi di Desa Cukkir sekitar 8 Km ke arah Tenggara Jombang. Selain pembangunan pesantren, Kyai Hasyim juga menjadi inisiator pendirian Nahdlatul Ulama’ (salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia). Zuhairi memberi catatan khusus bahwa pesantren yang didirikan Kyai Hasyim tidak hanya sebagai tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga berperan sebagai tempat di mana para ulama’ dan pejuang nasional melakukan konsolidasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.[[16]](#footnote-16)

Dalam konteks keummatan, peran Kyai Hasyim bisa dilihat dalam tubuh Nahdlatul Ulama juga sangat penting. Salah satu kitab beliau bahkan dijadikan sebagai dasar organisasi ini *(Qanun Al Asasi Al Nahdat Al-Ulama)* dan masih dipakai sampai sekarang.Dengan posisinya yang begitu sentral di NU, Kyai Haysim menggunakan strategi keummatan untuk menjadi perjuangan kebangsaan. Hal ini dibuktikan dengan peran Kyai Hasyim menjadi arsitek utama dalam mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang menurut Kyai Hasyim disebut sebagai *Jihad fi Sabilillah*.[[17]](#footnote-17) Resolusi Jihad tersebut merupakan salah satu perjuangan utama Kyai Hasyim dalam persoalan kebangsaan. Perjuangan kebangsaan Kyai Hasyim melalui resolusi jihad tersebut tidak terjadi secara instan. Sebelum munculnya resolusi jihad, Kyai Hasyim telah merintis para santri menjadi pejuang dengan mendirikan Laskar Hisbullah.[[18]](#footnote-18)

Tidak bisa dipungkiri bahwa karakter kepahlawanan Kyai Hasyim tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Kyai Hasyim sendiri. Apa yang diperjuangkan oleh Kyai Hasyim adalah apa yang telah dipikirkan Kyai Hasyim. Dalam rangka menelusuri pemikiran Kyai Hasyim (keagamaan, keummatan dan kebangsaan) yang telah membentuk karakter kepahlawanannya, peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa karya Kyai Hasyim. Di antara beberapa kitabnya adalah *Al-Tibyan fi al-Nahy ‘an Muqatha’at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan* (berisikan pembahasan pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan), *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam’iyyat Nahdlatul Ulama* (berisikan pesan penting yang melandasi berdirinya NU sekaligus yang menjelaskan fundamen yang kuat perihal paham keagamaan yang seharusnya dijadikan pijakan utama kaum Nahdiyyin), *Mawa’idz* (berisikan nasehat bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul di tengah umat akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan), *Arba’ina Haditsan Tata’allaqu bi Mabadi’ Jam’iyyat Nahdlatul Ulama* (berisikan pesan untuk meningkatkan ketakwaan dan kebersamaan untuk mengarungi kehidupan yang begitu sarat tantangan), dan fatwa Nahdlatul Ulama mengenai Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

Selanjutnya, perpaduan karakter keagamaan-kebangsaan yang diteladankan Kyai Hasyim Asy’ari bisa ditemukan melalui buah Naskah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Memang pada akhirnya, Naskah Teks Resolusi Jihad tersebut tidak bisa dilekatkan sebagai hanya kepemilikan bagi Kyai Hasyim Asy’ari saja. Sejarah lebih mengenalnya sebagai Resolusi Jihad NU. Memang Naskah Resolusi Jihad tersebut berangkat dari payung organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama’. Tetapi, apabila melihat sejarahnya lebih cermat dan mendalam, kehadiran Naskah Resolusi Jihad NU tidak lepas dari peran Kyai Hasyim Asy’ari sebagai Rois ‘Am bagi Nahdlatul Ulama’ pada saat itu. Ketika itu, Kyai Hasyim didatangi oleh para tokoh perjuangan pada masa itu yang mendesak Kyai Hasyim untuk mengeluarkan fatwa mengenai hukum membela tanah air (walaupun bukan Negara Islam) bagi umat Islam. Jawaban atas permintaan fatwa tersebut adalah keluarnya Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945. Karena memang perjuangan tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh Kyai Hasyim sendiri, maka memang sudah sepatutnya Fatwa tersebut mendapatkan payung legitimasi dari organisasi kegamaan Nahdlatul Ulama’ sehingga lebih dikenal dengan Resolusi Jihad NU (Untuk mengetahui Naskah Teks Resolusi Jihad dalam susunan kata aslinya, hal ini bisa dlihat dalam website http://tebuireng.org/teks-resolusi-jihad/).

Keluarnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 merupakan respon Kyai Hasyim khususnya dan para santri pada umumnya karena ancaman dari Sekutu bersama *Nederlandsch Indie Civil Administrative* (NICA) dan *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) untuk menjajah Indonesia kembali setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Resolusi ini juga sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan Presiden Soekarno kepada Hadratusyaikh. Resolusi ini berbentuk semacam fatwa yang telah diputuskan Kyai Hasyim dengan para konsul NU se-Jawa dan Madura dalam Rapat Besar pada 21-22 Oktober di Jalan Bubutan Surabaya-Jawa Timur.

Beberapa catatan yang menarik dari kelahiran Resolusi Jihad tersebut adalah pertautan karakter keagamaan dan kebangsaan yang dimiliki sebagai kesadaran bersama antara Kyai Hasyim dan para konsul NU Jawa dan Madura. Pertautan karakter keagamaan-kebangsaan bisa dilihat dari fakta yang menjadi penyebab penyusunan Resolusi Jihad. Fakta tersebut adalah adanya hasrat Umat Islam dan ‘Alim Ulama di tiap daerah untuk mempertahankan dan menegakkan Agama, Kedaulatan Negara Republik Indonesia Merdeka *(betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tiap daerah oentoek mempertahankan dan menegakkan Agama, Kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia Merdeka).*

Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan Resolusi Jihad adalah perbuatan Penjajah telah memberikan madharat kepada masyarakat, yang tidak sesuai dengan Islam *(Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem).* Oleh sebab itu, Resolusi Jihad diperlukan untuk membebaskan Rakyat Indonesia (yang sebagian besar terdiri dari umat Islam) dari kekejaman penjajahan *(Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam).*

Oleh sebab itu, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Resolusi Jihad memberikan fatwa mengenai wajibnya hukum jihad melawan penjajah bagi tiap Muslim. Dalam redaksi aslinya*, bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.* Selanjutnya, bahwa *pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja.* Redaksi dalam Resolusi Jihad tersebut memang menggunakan istilah *Jihad fi Sabilillah*. Secara tekstual, istilah tersebut bisa diartikan sebagai perjuangan untuk berperang dijalan Allah. Dengan menggunakan kajian filologi, makna tekstual tersebut tidak hanya bisa diterjemahakan untuk berjuang mendirikan Negara Islam, tetapi juga bisa diterjemahkan untuk berjuang mendirikan suatu Negara yang mana ajaran Islam bisa dilaksanakan. Agama Islam tentu saja akan dilaksanakan pada sebuah negara yang mana negara tersebut masih dalam keadaan terjajah dari negara lain.

## 3. Keteladan Kyai Hasyim Asy’ari sebagai Bahan Ajar

Melihat sangat kelihatannya pertautan antara karakter kebangsaan-keagamaan sebagaimana diteladankan Rois ‘Am NU Kyai Hasyim dalam memimpin para Konsul NU untuk menyusun resolusi jihad, kiranya sangatlah pantas Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 dan keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari tersebut menjadi bahan ajar materi pelajaran yang mempunyai kompetensi inti sikap sosial perpaduan cinta agama dan tanah air. Keteladanan Kyai Hasyim di atas tidak hanya diperlukan untuk masa peperangan. Di masa pengisian kemerdekaan seperti sekarang pun, keteladanan seperti itu justru sangat relevan dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Apalagi, bangsa Indonesia kini tengah menghadapi benih gerakan anti nasionalisme yang terjadi karena kesalahan memaknai ajaran agama. Sebagai contohnya adalah benih disintegrasi bangsa karena perbedaan agama, aksi terorisme karena radikalisme agama, pengeboman bunuh diri karena ingin menjadi syahid, gabungnya pemuda Indonesia dengan gerakan ISIS atas nama jihad, serta persoalan kebangsaan lain yang lahir karena kesalahan memaknai ajaran agama. Semua permasalahan bangsa tersebut tidak semestiya terjadi apabila para pelaku meneladani Kyai Hasyim.

Oleh sebab itu, sangat tepat pula keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari tersebut menjadi bahan ajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima SD/MI yang mempunyai kompetensi inti sikap sosial perpaduan cinta agama dan tanah air. Penggunaan keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari sebagai bahan ajar memiliki keunggulan sangat banyak. Salah satu keunggulannya adalah bahwa penggunaan keteladanan Kyai Hasyim sebagai bahan ajar akan memberdayakan kurikulum Indonesia sendiri yang mampu menggali potensi nasional dan lokal. Selain itu, penggunaan keteladanan Kyai Hasyim sebagai bahan ajar akan memperkuat rasa sebangsa dan seagama antara peserta didik dengan tokoh yang menjadi bahan ajar keteladanan.

Untuk melakukan penambahan bahan ajar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat kepada Regulasi/kebijakan yang digariskan pemerintah. Pasal 2 ayat (5) Permendikbud 24/2016 menyatakan bahwa keberadaan buku teks harus mengikuti kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diatur dalam regulasi tersebut. Selanjutnya, bahan dasar sebagai pertimbangan penetapan dan perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah haruslah mengacu kepada kompetensi inti dan kompetensi yang telah ditetapkan regulasi tersebut.

Sementara, sesuai dengan isi dan lampiran ke-24 Permendikbud 24/2016, keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari belum menjadi bagian dari bahan ajar dalam pengkisahan tokoh agama Islam. Tokoh yang menjadi contoh keteladanan hanyalah para nabi yakni Rasul Allah, Rasul Ulul ‘Azmi , Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa’, dan Nabi Muhammad saw. Untuk mengurai masalah ini, solusi yang ditawarkan haruslah berangkat dari rekonstruksi atas Komepetensi Dasar pada Kompetensi Inti Sikap Spiritual. Pemilihan bahan ajar untuk melaksanakan kompetensi inti sikap sosial tidak bisa dilepaskan dari kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual. Sesuai lampiran ke-24 Permendikbud 24/2016, kompetensi dasar dari kompetensi inti sikap spiritual hanyalah berkutat kepada upaya mendorong peserta didik untuk “meyakini kebenaranan” akan kisah dari para nabi yakni Rasul Allah, Rasul Ulul ‘Azmi , Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa’, dan Nabi Muhammad saw. Seharusnya kompetensi dasarnya tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, kompetensi dasar pada kompetensi sikap sosial bisa dikembangkan dengan redaksi “meyakini dampak pelaksanaan ajaran agama bagi kehidupan sosial dengan contoh keteladanan para tokoh”. Tokoh yang menjadi kisah tidak hanya berhenti kepada para Nabi, tetapi juga bisa dikembangkan kepada tokoh nasional seperti Kyai Hasyim Asy’ari dan tokoh-tokoh lainnya. Maka, dalam kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap sosial, guru bisa menyusun kompetensinya dengan redaksi “meneladani keteladanan para tokoh dalam melaksanakan ajaran agamanya sekaligus perjuangan kehidupan sosialnya”. Contoh pelaksanaan kompetensi inti sikap sosial bagi salah satu tokoh nasional adalah meneladani keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari dalam melaksanakan ajaran Islam sekaligus perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, Guru bisa mengembangkan dan membuat bahan ajar bagi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima SD/MI bersumberkan keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari dengan contoh Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

# KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana amanat Kurikulum 2013 harus selalu dikawal dengan peninjauan atas bahan ajarnya. Dalam implementasinya bagi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima SD/MI, bahan ajar yang disediakan tidak seharusnya hanya diorientasikan kepada pengisahan keteladanan tokoh dengan pertimbangan keadaan yang seagama saja. Inovasi bahan ajar harus selalu dilakukan dengan cara mencoba menghadirkan kisah keteladanan tokoh yang mempunyai kesamaan agama dan bangsa/negara sekaligus. Pertimbangan ini harus diambil mengingat kompetensi sikap sosial yang ingin diwujudkan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak hanya upaya membangun kecintaan peserta didik terhadap agamanya saja. Kompetensi sikap sosial yang diharapkan juga menyangkut kepada upaya membangun kecintaan peserta didik terhadap agama sekaligus negara/bangsanya.

Kisah Kyai Hasyim Asy’ari bisa dijadikan sebagai salah satu bahan ajar untuk memenuhi kompetensi inti sikap sosial pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas Lima SD/MI. Namun sebelum penambahan keteladanan Kyai Hasyim Asy’ari sebagai bahan ajar tersebut, guru harus terlebh dahulu meninjau kepada Lampiran ke-24 Permendikbud 24/2016 yang mengatur tentang penjelasan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD/MI. Lampiran tersebut memang belum mengatur adanya pemanfaatan tokoh nasional sebagai kisan keteladanan tokoh yang mempunyai karakter keagamaan-kebangsaan. Oleh sebab itu, Permendikbud 24/2016 tersebut perlu ditinjau ulang agar Guru bisa memasukkan tokoh-tokoh nasional yang mempunyai keteladana karakter keagamaan-kebangsaan. Tidak hanya Kyai Hasyim Asy’ari, tetapi juga bisa Kyai Ahmad Dahlan, Kyai Haji Agus Salim, Imam Bonjol, dst.

**DAFTAR PUSTAKA**

As'ad, Mahrus “Pembaruan Pendidikan Islam K.H. Hasyim Asy’ari” dalam *Jurnal Tsaqafah* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2012.

Baroroh, Siti dan Baried, dkk. *Pengantar Teori Filologi.* Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1994.

Baroroh, Siti dan Baried, dkk. *Pengantar Teori Filologi.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Darusuprapta, “Beberapa Masalah Kebahasaan dalam Penelitian Naskah”. *Widyaparwa*. No. 26 Oktober 1984. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Djamaris, Edwar, “Filologi dan Cara Kerja Penelitian Filologi”. *Bahasa dan Sastra* Tahun III No. I. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Hadzik,Muhammad Ishom dan Nia Daniati, *KH. Hasyim Asy’ari: Figur Ulama dan Pejuang Sejati.* Surabaya: PT Litera Perkasa, 2000.

J.C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation.* London: Oxford University Press, 1965.

Khuluq, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari.* Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2008.

Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari (Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan).* Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

Nikmah, Zetty Azizatun “Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy’ari 1871-1947 M): Study Komparatif dalam Konsep Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia” dalam Jurnal Didaktia Religia Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Di Bidang Pendidikan.

Pusat Kurikulum, *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah.* Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010.

Rohim, Zaini Tamin Abd “Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)” dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015.

Samani, Muchlas dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013.

Sholikah “Pendidikan Karakter Menurut K.H. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adâb Al-‘Âlim Wa Al-Muta‘Allim” dalam Jurnal *Maraji’* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

1. Zaini Tamin Abd Rohim, *“Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)”*, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015, h. 324-345. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sholikah, *“Pendidikan Karakter Menurut K.H. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adâb Al-‘Âlim Wa Al-Muta‘Allim”*, dalam Jurnal Maraji’ Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, h.117-143. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zetty Azizatun Nikmah, *“Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy’ari 1871-1947 M): Study Komparatif dalam Konsep Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia”*, dalam Jurnal Didaktia Religia Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014, h.135-174. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mahrus As'ad, *“Pembaruan Pendidikan Islam K.H. Hasyim Asy’ari”*, dalam Jurnal Tsaqafah Volume 8 Nomor 1 Tahun 2012, h. 105-134. [↑](#footnote-ref-4)
5. Djamaris, *“Filologi dan Cara Kerja Penelitian Filologi”,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977), h. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Siti Baroroh dan Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), h. 5-6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Djamaris, *“Filologi….,* h. 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Siti Baroroh dan Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi…,* h. 65. [↑](#footnote-ref-8)
9. Siti Baroroh dan Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi,* (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1994), h.67-68. [↑](#footnote-ref-9)
10. Darusuprapta, *“Beberapa Masalah Kebahasaan dalam Penelitian Naskah”,* (Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. J.C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation,* (London: Oxford University Press, 1965), h. 5. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muchlas Samani dan Hariyant, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 236. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* h. 237. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* h. 107. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pusat Kurikulum, *Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah,* (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010), h. 9-10. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari (Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan),* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), h. 69. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy’ari,* (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2008), h. 110-115. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Ishom Hadzik dan Nia Daniati, *KH. Hasyim Asy’ari: Figur Ulama dan Pejuang Sejati,* (Surabaya: PT Litera Perkasa, 2000), h. 87. [↑](#footnote-ref-18)